



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
 - b. bahwa sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor; 900/535/Keuda tertanggal 28 Januari 2020, menyatakan Pemerintah Kota Banjar dalam pemberian TPP Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900/535/Keuda tertanggal 28 Januari 2020 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
15. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan baik struktural maupun fungsional atau unit organisasi.
16. Kondisi kerja adalah kondisi dimana pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
17. Kelangkaan profesi adalah profesi ASN sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kota Banjar.
18. Prestasi kerja adalah ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya.
19. Tempat bertugas adalah kondisi dimana ASN melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan pada daerah terpencil.
20. Pertimbangan objektif lainnya adalah kondisi dimana ASN dalam melaksanakan tugasnya dan diberikan penghargaan dengan memperhatikan karakteristik daerah, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki beban kerja sesuai dengan jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun fungsional.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
23. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN ASN sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kota Banjar.

24. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
25. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
26. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai Hari Raya yang selanjutnya disingkat dengan TPP Hari Raya, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam menyambut hari raya Idul Fitri.
28. Tambahan Penghasilan Ketiga Belas yang selanjutnya disingkat dengan TPP Ketiga Belas, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi tambahan atas kelebihan jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.
29. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
30. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
31. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
32. Nilai Jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
33. Absensi *Online* adalah sistem informasi kehadiran pegawai yang berbentuk aplikasi.
34. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi.
35. Pelaksana Tugas atau disingkat Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
36. Pelaksana Harian atau disingkat Plh. adalah Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
37. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dasar dalam memberikan TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin ASN;
 - b. meningkatkan kesejahteraan ASN;
 - c. meningkatkan produktifitas kerja ASN;
 - d. menciptakan ASN yang profesional; dan
 - e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penerima TPP;
- c. besaran TPP;
- d. pembayaran TPP;
- e. evaluasi TPP; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{ATPPBKPK \text{ Daerah Kota} = (40\% * BTPP \text{ Daerah Kota}) + 60\% * BTPP \text{ Daerah Kota}}$$

Keterangan:

ATPPBKPK Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Daerah Kota
BTPP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah Kota.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah Kota.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Daerah Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{ATPPTB\ Daerah\ Kota=(10\%*BTPP\ Daerah\ Kota*ITPPTB\ Daerah\ Kota)}$$

Keterangan:

ATPPTB Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Daerah Kota
B TPP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota
ITPPTB Daerah Kota	=	Indeks TPP tempat bertugas Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Daerah Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah Kota.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{TPPTP\ Daerah\ Kota = (10\% *BTPP\ Daerah\ Kota)}$$

Keterangan:

ATPPKK Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Daerah Kota
BTPP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus yaitu dokter spesialis dan sub spesialis; dan
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Daerah Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah Kota.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ATPPK\ Daerah\ Kota = (10\% * BTPP\ Daerah\ Kota)}$$

Keterangan:

ATPPK Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Daerah Kota
BTPP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB V
PENERIMA TPP

Pasal 10

(1) Pegawai yang diberi TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini yaitu ASN yang memangku jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, kecuali:

a. ASN yang memangku jabatan fungsional Guru, pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah diberikan TPP dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Besaran
1.	Pengawas Sekolah dan Penilik, Golongan IV	Rp.1.675.000,00
2.	Pengawas Sekolah dan Penilik, Golongan III	Rp.1.500.000,00
3.	Pengawas Sekolah dan Penilik, Golongan II	Rp.1.425.000,00
4.	Kepala Sekolah	Rp.1.675.000,00
5.	Jabatan Fungsional Guru, Golongan IV	Rp.1.175.000,00
6.	Jabatan Fungsional Guru, Golongan III	Rp.1.050.000,00
7.	Jabatan Fungsional Guru, Golongan II	Rp.1.050.000,00

b. ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar tidak diberikan TPP dari APBD Kota Banjar; dan

c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk dokter spesialis diberikan TPP yang bersumber dari APBD Kota Banjar.

(2) ASN yang memangku jabatan fungsional Penera Madya Kelas Jabatan 11 diberikan TPP setara eselon IV a Kelas Jabatan 8 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

(3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai Bulan Maret 2020 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran bulan April 2020.

Pasal 11

(1) ASN yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan TPP.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN berdasarkan besaran Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan masing-masing ASN.

Pasal 12

- (1) ASN dengan status titipan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya tidak diberikan TPP.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ASN yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Banjar.
- (3) TPP bagi ASN yang memangku jabatan sebagai :
 - a. Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - c. Pengemudi Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. Pengurus Barang; dan
 - f. Pengadministrasi Surat.

Mendapatkan tambahan TPP dengan rincian:

No	Jabatan	Besaran /bulan
1.	Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp. 500.000,00
2.	Sekretaris Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp. 500.000,00
3.	Pengemudi Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp. 1.000.000,00
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 100.000,00
5.	Pengurus Barang	Rp. 200.000,00
6.	Pengadministrasi Surat yang diberi tugas tambahan pada Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Asisten Daerah	Rp. 500.000,00

- (4) TPP bagi ASN yang memangku jabatan sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Wali Kota mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 7.
- (5) TPP bagi ASN yang memangku jabatan sebagai Pengurus Barang berdasarkan Keputusan Wali Kota mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 6.
- (6) TPP bagi ASN Golongan I mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 3.
- (7) TPP bagi ASN Golongan II mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 5.

Pasal 13

- (1) ASN dengan jabatan fungsional tertentu yang belum difungsionalkan dibayarkan setara dengan Jabatan Fungsional Umum.
- (2) ASN Jabatan Fungsional Umum Kelas Jabatan 7 mendapatkan TPP setara dengan Kelas Jabatan 6.
- (3) Penyesuaian Kelas Jabatan 7 akan dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi kinerja.

Pasal 14

- (1) ASN yang menduduki jabatan eselon III/b pada UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari mendapat TPP setara Kelas Jabatan 11.
- (2) ASN yang menduduki jabatan eselon IV/a pada UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari mendapat TPP setara Kelas Jabatan 9.
- (3) ASN yang diberi tugas tambahan sebagai kepala BLUD Puskesmas menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) ASN yang menduduki jabatan eselon IV/a pada Kelas Jabatan 8 dan Kelas Jabatan 9 mendapatkan TPP Kelas Jabatan 9.
- (2) ASN yang menduduki jabatan eselon IV/b pada Kelas Jabatan 8 dan Kelas Jabatan 9 mendapatkan TPP Kelas Jabatan 8.

Pasal 16

- (1) ASN dengan Kelas Jabatan 11 yang menduduki jabatan eselon III/a pada Inspektorat Daerah setara dengan Kelas Jabatan 12.
- (2) ASN dengan Kelas Jabatan 12 yang menduduki jabatan eselon III/a pada Kecamatan diberi tambahan TPP sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) ASN dengan Kelas Jabatan 9 yang menduduki jabatan eselon IV/a pada Kelurahan diberi tambahan TPP sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB VI

BESARAN TPP

Pasal 17

- (1) Penetapan jumlah TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan TPP untuk ASN dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi pada BLUD RSUD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.

BAB VII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada akhir bulan berkenaan.

- (2) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan dan diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan TPP bulan ke 13 (tiga belas) dan TPP THR menjelang hari tertentu berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP bulan ke 13 (tiga belas) dan TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PENGURANGAN TPP

Pasal 20

- (1) ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1%
TL 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) TL2 yaitu ASN yang berhalangan hadir karena alasan yang sah dan didukung izin atasan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) TL3 dan TL4 yaitu ASN yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung.

Pasal 21

- (1) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
1	2	3
PSW 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1%
PSW 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
PSW 4	> 91 menit	1,55%

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pegawai yang pulang sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) ASN yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh dipotong sebesar 3 % (tiga per seratus).

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mempersiapkan/menyediakan Perangkat yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran/ketidakhadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas yaitu Absensi *Online* melalui Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.
- (2) Pengolahan data absensi Pegawai ASN serta pemeliharannya dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal absensi *online* dalam keadaan rusak, maka Pegawai ASN dapat mengisi absensi manual sesuai format yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Pegawai ASN yang memiliki jam kerja khusus, dapat mengisi absensi sesuai format yang ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 23

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dalam hal :
 - a. ASN yang tidak masuk kerja karena Sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, maksimal untuk empat belas hari kerja dalam bulan yang bersangkutan;
 - b. ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit pada 3 (tiga) bulan pertama dan atau cuti alasan penting;
 - c. ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar, diberikan TPP dengan besaran TPP diturunkan menjadi 50% (lima puluh persen); dan
 - d. ASN yang tidak masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung, maksimal dua hari kerja pada bulan yang bersangkutan;
- (2) Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berkenaan.

Pasal 24

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 25

- (1) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. Pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi,

ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB IX

EVALUASI TPP

Pasal 26

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari APBD.

Pasal 28

- (1) Pemberian TPP diberikan berdasarkan kinerja pada bulan sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara efektif mulai bulan Januari 2021 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran bulan Februari 2021.

Pasal 29

Pembayaran TPP ASN untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 18);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 26);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 48); dan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

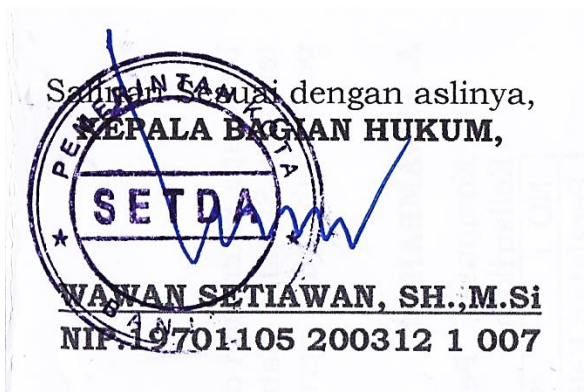
Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Januari 2021
WALI KOTA BANJAR,
ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,
ttd
ADE SETIANA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;

Pemerintah Daerah Kota Banjar telah mengirimkan surat Wali Kota Banjar Nomor: P/2526/841/Setda/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019 hal persetujuan tentang TPP ASN Kota Banjar dan telah mendapat pemberitahuan berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900/535/Keuda tertanggal 28 Januari 2020 yang menyatakan:

1. Kebijakan TPP kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020, telah diterbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/14089/SJ tertanggal 17 Desember 2019 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Besaran alokasi TPP kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak melebihi alokasi anggaran TPP Tahun Anggaran 2019;
3. TPP bagi Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Inspektorat Daerah diberikan lebih besar dari perangkat daerah lainnya dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap rencana Pemerintah Kota Banjar dalam pemberian TPP Tahun Anggaran 2020, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu menyusun Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yaitu pekerjaan sebagai pembuat regulasi/kebijakan, pemeriksaan dan pengelolaan keuangan daerah.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Kriteria pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, kinerja, memotivasi, pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

huruf a

ASN yang memangku jabatan fungsional guru, pengawas, penilik dan kepala sekolah telah memiliki sertifikat pendidik dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku diberi tunjangan profesi.

huruf b

BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor: 445/Kpts.146 -RSUD/2011.

huruf c

Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki keahlian dan kompetensi dokter spesialis dan sub spesialis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dan bekerja secara penuh.

ayat (4) sampai dengan ayat (7)

Dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pelaksanaan kesetaraan dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan tidak mengurangi rasa keadilan dan akan dilakukan penyesuaian melalui evaluasi kinerja.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Kesetaraan dilakukan terkait pembinaan dan pengawasan fungsional, terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintah desa serta penanggungjawab pada pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Auditor.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3